

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Keberadaan Provinsi Jawa Timur merupakan proses sejarah panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan pada zamannya. Pembentukan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111°0' hingga 114°4' Bujur Timur, dan 7°12' hingga 8°48' Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 46.428 kilometer persegi, terbagi ke dalam empat badan koordinasi wilayah (Bakorwil), 29 kabupaten, sembilan kota, dan 658 kecamatan dengan 8.457 desa/kelurahan (2.400 kelurahan dan 6.097 desa). Secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur atau mencapai 47.157,72 kilometer persegi, dan wilayah Kepulauan Madura yang sekitar 10% dari luas wilayah Jawa Timur.

Di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 kilometer. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200

kilometer, sedangkan di bagian timur lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan Pulau Sempu.

Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga wilayah dataran, yakni dataran tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata di atas 100 meter dari permukaan laut (Magetan, Trenggalek, Blitar, Malang, Batu, Bondowoso). Dataran sedang mempunyai ketinggian 45-100 meter di atas permukaan laut (Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Madiun, Ngawi). Kabupaten/kota (20) sisanya berada di daerah dataran rendah, yakni dengan ketinggian di bawah 45 meter dari permukaan laut. Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota yang letaknya paling rendah, yaitu sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kota yang letaknya paling tinggi dari permukaan laut adalah Malang, dengan ketinggian 445 m di atas permukaan laut.

Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam tiga zona: zona selatan-barat (plato), merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup besar; zona tengah (gunung berapi), merupakan daerah relatif subur terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso); dan zona utara dan Madura (lipatan), merupakan daerah relatif kurang subur (pantai, dataran rendah dan pegunungan). Di bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) ini terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus. Pada bagian tengah wilayah Jawa Timur terbentang rangkaian pegunungan berapi. Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu

(3.265 meter). Di sebelah selatan Nganjuk terdapat Gunung Willis (2.169 meter) dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.239 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Wayang (2.198 meter), Gunung Kawi (2.681 meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter). Pegunungan tersebut terletak di sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter) dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang disebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di bagian timur terdapat dua kelompok pegunungan, yaitu Pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.332 meter). Pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta.

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290 km), dan Bengawan Solo. Sungai Brantas memiliki mata air di daerah Malang. Sesampai di Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua yaitu Kali Mas dan Kali Porong. Keduanya bermuara di Selat Madura. Bengawan Solo berasal dari Jawa Tengah, akhirnya bermuara di Gresik. Di lereng Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga Sarangan, sebuah danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara lain Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk irigasi, pemeliharaan ikan, dan pariwisata.

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan dengan wilayah Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan lebih

sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar 21-34°C. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, bahkan di daerah Ranu Pane (lereng Gunung Semeru), suhu bisa mencapai minus 4°C, yang menyebabkan turunnya salju lembut. Temperatur pada 2007 yang tertinggi di bulan Oktober dan November (35,3°C), dan terendah di bulan Agustus (19,3°C) dengan kelembaban 39%-97%. Tekanan udara tertinggi di bulan Agustus sebesar 1.012,0 Milibar. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di bulan Februari. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus, sedangkan terendah di bulan April. Kecepatan angin tertinggi terjadi di bulan Oktober, dan terendah di bulan April.

Untuk kondisi demografis, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, pada 2013 mencapai 38.363.200 jiwa. Pada 2012 jumlah penduduk Jawa Timur tercatat sebanyak 38.106.600 jiwa (51% di antaranya adalah perempuan), dengan kepadatan 814 jiwa/km². Kepadatan penduduk di kota umumnya lebih tinggi dibanding di kabupaten. Kota Surabaya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni 8.335 jiwa/km², sekaligus mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 2.720.156 jiwa, diikuti Kabupaten Malang (2.442.422 jiwa), dan Kabupaten Jember (2.293.740 jiwa). Kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi (di atas 1%) pada periode 2012-2013 adalah Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar 1,24%, disusul Kabupaten Jombang (1,25%), Kota Probolinggo (1,71%); Kabupaten Gresik (1,77%); Kabupaten Bangkalan (1,77%); Kabupaten Sampang (1,93%); dan Kabupaten Pamekasan (2,02%). Sedangkan daerah dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kabupaten Madiun (0,02%); Kabupaten Blitar (0,03%); dan Kabupaten Kediri (0,04%). Laju pertumbuhan penduduk Kota Surabaya juga tergolong relatif rendah, yakni 0,07%.

Etnisitas di Jawa Timur relatif heterogen, mayoritas penduduk adalah suku Jawa. Suku Madura mendiami Pulau Madura dan daerah bagian timur, terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan timur, suku Madura, termasuk Pendalungan (campuran Jawa dan Madura), merupakan mayoritas. Suku Madura tersebar hampir di seluruh kota di Jawa Timur, umumnya mereka bekerja di sektor informal. Suku Tengger, yang konon keturunan pelarian Kerajaan Majapahit, tersebar di Pegunungan Tengger dan sekitarnya. Suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Suku Bali juga bermukim di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal di sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, penduduk keturunan Tionghoa dan Arab juga tersebar di hampir semua wilayah kabupaten/kota Jawa Timur. Juga warga ekspatriat, terutama tinggal di Kota Surabaya, dan sejumlah kawasan industri lainnya. Penduduk Jawa Timur mayoritas beragama Islam (95,76%). Sedangkan penduduk yang beragama Kristen Protestan sebesar 1,98%; Katolik (0,98%); Hindu (0,94%); Budha (0,29%); dan lainnya (0,05%).

4.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2013 disajikan pada tabel 4.1. Pada tahun 2009 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 686,85 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 778,57 triliun pada tahun 2010, Rp. 884,50 triliun pada tahun 2011, Rp. 1.001,72 triliun pada tahun 2012 dan Rp. 1.136,33 triliun pada tahun 2013. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Jawa Timur tahun 2009 meningkat dari Rp. 320,86 triliun menjadi Rp. 393,67 triliun pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 419,43 triliun. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 5,01 persen, kemudian

tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing mengalami percepatan sebesar 6,68 persen, 7,22 persen dan 7,27 persen, akan tetapi mengalami perlambatan menjadi 6,55 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu tersebut lebih cepat dari rata-rata nasional.

Tabel 4.1 **Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013**

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013
PDRB ADHB (miliar rupiah)	686.848	778.566	884.503	1.001.721	1.136.330
PDRB ADHK 2000 (miliar rupiah)	320.861	342.281	366.984	393.666	419.430
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	6,68	7,22	7,27	6,55
Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	4,55	6,10	6,50	6,23	5,78

Sumber: BPS Jawa Timur

Tabel 4.2 **Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2013 (persen)**

Sektor-sektor Perekonomian Provinsi Jawa Timur	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	3,92	2,23	2,53	3,49	1,59
Pertambangan dan Penggalian	6,92	9,18	6,08	2,10	3,30
Industri Pengolahan	2,80	4,32	6,06	6,34	5,59
Listrik, Gas, dan Air Bersih	2,72	6,43	6,25	6,21	4,74
Konstruksi	4,25	6,64	9,12	7,05	9,08
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,58	10,67	9,81	10,06	8,61
Pengangkutan dan Komunikasi	12,98	10,07	11,44	9,64	10,43
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5,30	7,27	8,18	8,01	7,68
Jasa-jasa	5,76	4,34	5,08	5,07	5,32
PDRB	5,01	6,68	7,22	7,27	6,55

Sumber: BPS Jawa Timur

Dapat dilihat pada Tabel 4.2 diatas, secara sektoral, secara umum pada tahun 2013 seluruh sektor mengalami perlambatan kecuali konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa. Sektor pertanian mengalami perlambatan pada tahun 2010 dan mengalami percepatan sampai dengan tahun 2012 dan kembali melambat pada tahun 2013. Industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam struktur PDRB mengalami percepatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, namun mengalami

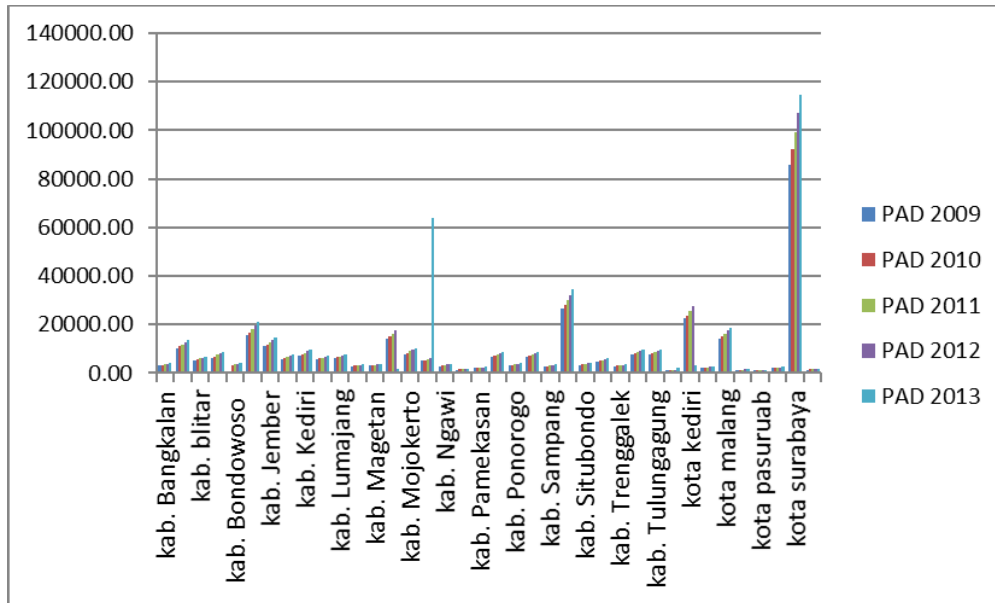
perlambatan pada tahun 2013. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi dominan mengalami percepatan pada tahun 2009 dan 2010, namun mengalami perlambatan pada tahun 2011 dan kembali mengalami percepatan 10,06 persen pada tahun 2012 dan kembali melambat menjadi 8,61 persen pada tahun 2013. Situasi perekonomian global yang masih mengalami krisis sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tercermin dari pertumbuhan sektoralnya.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara umum memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi provinsi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kota Batu pada tahun 2012 dengan pertumbuhan sebesar 8,26 persen, sedangkan terendah pada kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 5.82 persen, yang secara rinci dapat dilihat pada lampiran.

4.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur

Pemerintah daerah melalui upayanya memenuhi kewajiban daerah salah satu tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian yang diharapkan secara langsung akan berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Meningkatkan perekonomian berarti pemerintah daerah harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerahnya, sehingga mampu menghasilkan pendapatan asli daerah. Apabila pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, maka hal tersebut akan sangat membebani pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi tujuan tersebut pemerintah diharapkan dapat mempunyai sistem keuangan sendiri baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat. Berikut grafik Pendapatan Asli Daerah dari setiap kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Grafik 4.1 Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 (juta rupiah)



Sumber: BPS Jawa Timur

Berdasarkan grafik 4.1 di atas, dapat terlihat bahwa dominasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di dominasi kota-kota tertentu saja. Seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang perekonomiannya utamanya mengandalkan sektor industri. Sedangkan yang mengandalkan sektor pertanian seperti Pasuruan, Madiun dan kota lainnya terlihat tidak begitu besar Pendapatan Asli Daerahnya. Ketimpangan ini akan mempengaruhi besar kecilnya anggaran untuk belanja pemerintah daerah yang selanjutnya digunakan untuk membangun infrastruktur daerah.

4.4 Belanja Modal Provinsi Jawa Timur

APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2009 kekuatan belanja daerah Provinsi Jawa Timur 2009 sebesar Rp 7,60 triliun lebih dan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 16,78 triliun lebih dengan

peningkatan rata-rata per tahun sebesar 22,27%. Meskipun nilai belanja daerah meningkat namun laju pertumbuhannya berfluktuatif dan cenderung menurun, pada tahun 2010 pertumbuhan belanja daerah sebesar 31,68%, tahun 2011 pertumbuhan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 288. Sejak tahun 2009, distribusi alokasi belanja langsung selalu didominasi belanja barang/jasa (di atas 60%). Sementara belanja modal rata-rata hanya 20%.

Tabel 4.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009-2013 (juta rupiah)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013 **	Rata-rata Pertumbuhan(%)
Belanja langsung	3.283.140	4.140.262	5.096.053	5.677.971	6.186.181,94	17,39
Belanja Pegawai	483.187	668.598	895.166	1.019.269	1.164.943,22	25,10
Belanja Barang dan Jasa	1.962.653	2.593.788	3.155.525	3.601.337	3.845.796,03	18,68
Belanja Modal	837.300	877.877	1.045.362	1.057.365	1.175.442,70	9,06

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

4.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Jawa Timur

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rata-Rata Perkembangan/Kenaikan Realisasi Penerimaan Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009-2013 (juta rupiah)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013 **	Rata-rata Pertumbuhan(%)
Penerimaan Pembiayaan	2.061.246,53	2.000.253,45	1.564.783,41	1.359.475,04	1.753.509,14	(2,22)
SiLPA Tahun Lalu	2.061.246,53	1.930.998,87	1.479.695,65	1.223.913,29	1.153.509,14	(13,18)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	41.500,00	0,00	0,00	600.000,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	23.254,58	34.687,76	2.057,69	0,00	

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 4,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Jawa Timur semakin baik.

4.6 Hasil Analisis

4.6.1 Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif yang digunakan mengacu pada analisis statistik deskriptif, yang digunakan untuk menjelaskan, meringkas, menyederhanakan, mengorganisasi dan menyajikan data secara statistik ke dalam bentuk yang teratur dan sederhana agar mudah dibaca dan dipahami. Obyek penelitian berjumlah 190 data yang terdiri dari data *cross-section* sebanyak 38 kabupaten/kota dan data *timeseries* sebanyak 5 tahun.

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

	PDRB	PAD	BM	SILPA
Mean	9778.410	146.4632	204.3743	119.6744
Median	5599.100	77.84000	159.4300	92.31500
Maximum	114743.8	2570.790	1732.020	1579.080
Minimum	307.0900	17.39000	50.30000	4.290000
Std. Dev.	16755.57	295.3170	181.6381	154.6293
Skewness	4.497470	6.242056	4.851657	6.246179
Kurtosis	24.65791	45.57409	34.41562	52.46498

Jarque-Bera	4353.962	15583.22	8558.671	20605.84
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	1857897.81	27828.00	38831.11	22738.13
Sum Sq. Dev.	5.31E+10	16483090	6235563.	4519034.
Observations	190	190	190	190

Sumber: Output Eviews v.6, diolah

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) dari 190 data tersebut adalah 9778.410, dengan nilai laju pertumbuhan tertinggi sebesar 114743.8 dan nilai terendah 307.0900. Selanjutnya, variabel independen yang akan diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Data statistik deskriptif atas variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 146.4632, dengan nilai PAD tertinggi sebesar 2570.790 dan terendah sebesar 17.39000. Sedangkan belanja modal (BM) menunjukkan data statistik deskriptif dengan nilai rata-rata belanja modal adalah 204.3743, nilai belanja modal tertinggi sebesar 1732.020 dan nilai terendah sebesar 50.30000. Statistik deskriptif atas data SiLPA menunjukkan nilai rata-rata sebesar 119.6744, dengan nilai tertinggi sebesar 1579.080 dan nilai terendah sebesar 4.290000.

Dari nilai standar deviasi, variabel PDRB mempunyai standar deviasi terbesar (16755.57) dibandingkan variabel yang lain. Standar deviasi merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan data dari mean. Dalam analisis data panel, uji normalitas dapat diabaikan karena jumlah data sangat besar (>100) sehingga sangat dimungkinkan residual terdistribusi normal meskipun probabilitas Jarque-Bera signifikan. *Finally, if we are dealing with a small, or finite, sample size, say data of less than 100 observations, the normality assumption assumes a critical role. As we will show subsequently, if the sample*

size is reasonably large, we may be able to relax the normality assumption (Gujarati, 2004:110)

4.6.2 Hasil Regresi Data Panel

Berikut ini akan dijelaskan hasil regresi data panel dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu *Ordinary Least Square* (OLS), *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

4.6.2.1 Ordinary Least Square (OLS)

Hasil pengujian regresi data panel dengan model *Ordinary Least Square* akan dijelaskan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 *Estimation Output Ordinary Least Square*

Dependent Variable: PDRB				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/18/15 Time: 18:40				
Sample: 2009 2013				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-203.1242	732.6902	-0.277231	0.7819
PAD	40.28600	2.550891	15.79292	0.0000
BM	-0.063009	5.270808	-0.011954	0.9905
SILPA	34.20946	4.509666	7.585808	0.0000
R-squared	0.874884	Mean dependent var	9778.410	
Adjusted R-squared	0.872866	S.D. dependent var	16755.57	
S.E. of regression	5974.342	Akaike info criterion	20.24916	
Sum squared resid	6.64E+09	Schwarz criterion	20.31752	
Log likelihood	-1919.671	Hannan-Quinn criter.	20.27685	
F-statistic	433.5400	Durbin-Watson stat	1.014999	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews v.6, diolah

Berdasarkan hasil regresi data panel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-squared* adalah sebesar 87,48%. Nilai koefisien determinasi dengan model OLS ini sudah cukup baik.

Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* yang cukup baik yaitu 1,014999.

4.6.2.2 Fixed Effect Model

Hasil pengujian regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* akan dijelaskan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 *Estimation Output Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PDRB				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/18/15 Time: 20:39				
Sample: 2009 2013				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6748.106	1161.415	5.810246	0.0000
PAD	11.26376	4.839989	2.327229	0.0213
BM	8.578026	5.218917	1.643641	0.1024
SILPA	-3.113039	7.543059	-0.412702	0.6804
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.938500	Mean dependent var	9778.410	
Adjusted R-squared	0.921990	S.D. dependent var	16755.57	
S.E. of regression	4679.884	Akaike info criterion	19.92844	
Sum squared resid	3.26E+09	Schwarz criterion	20.62911	
Log likelihood	-1852.201	Hannan-Quinn criter.	20.21227	
F-statistic	56.84394	Durbin-Watson stat	1.616154	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews v.6, diolah

Berdasarkan hasil regresi data panel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-squared* adalah sebesar 93,85%. Nilai koefisien determinasi dengan *fixed effect model* ini dinilai sudah cukup baik. Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* yang cukup baik yaitu 1,612154.

4.6.2.3 Random Effect Model

Hasil pengujian regresi data panel dengan *Random Effect Model* akan dijelaskan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 *Estimation Output Random Effect*

Dependent Variable: PDRB					
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)					
Date: 01/18/15 Time: 21:16					
Sample: 2009 2013					
Periods included: 5					
Cross-sections included: 38					
Total panel (balanced) observations: 190					
Swamy and Arora estimator of component variances					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	310.0249	753.6413	0.411369	0.6813	
PAD	38.71540	2.321846	16.67441	0.0000	
BM	-2.250328	4.491072	-0.501067	0.6169	
SILPA	35.57917	3.945820	9.016926	0.0000	
Effects Specification				S.D.	Rho
Cross-section random				2463.304	0.2169
Idiosyncratic random				4679.884	0.7831
Weighted Statistics					
R-squared	0.787140	Mean dependent var	6331.390		
Adjusted R-squared	0.783707	S.D. dependent var	11395.22		
S.E. of regression	5299.609	Sum squared resid	5.22E+09		
F-statistic	229.2717	Durbin-Watson stat	1.274986		
Prob(F-statistic)	0.000000				
Unweighted Statistics					
R-squared	0.873218	Mean dependent var	9778.410		
Sum squared resid	6.73E+09	Durbin-Watson stat	0.990074		

Sumber: Output Eviews v.6, diolah

Berdasarkan hasil regresi data panel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-squared* adalah sebesar 78,71%. Nilai koefisien determinasi dengan *random effect model* ini dinilai cukup baik. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* yang tidak terlalu tinggi yaitu 0,990074. Hasil regresi data panel dengan menggunakan

random effect model juga menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian ini. Rincian pengaruh individu dari data *cross section* terdapat pada lampiran.

4.6.3 Penentuan Model Analisis

4.6.3.1 Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Likelihood Ratio Test dilakukan untuk mengetahui apakah model akan dianalisis dengan menggunakan metode *pooled least square* atau *fixed effect*. Uji ini dilakukan dengan prosedur uji F-stat dengan hipotesis:

H_0 : Model *Pooled Least Square* (*restricted*)

H_1 : Model *Fixed Effect* (*unrestricted*)

Hasil dari *Likelihood Ratio Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Likelihood Ratio Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.165562	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	134.938309	37	0.0000

Sumber: Output Eviews v.6, diolah

Dari hasil olahan Eviews 6 diketahui nilai *p-value* sebesar 0,0000. Dengan nilai *p-value* yang lebih kecil dari α (0,05), maka kesimpulan dari hasil *Likelihood Ratio Test* adalah menolak H_0 , sehingga model yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

4.6.3.2 Hausman Test

Hausman Test digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis:

H₀: Model *Random Effect*

H₁: Model *Fixed Effect (unrestricted)*

Hasil dari *Hausman Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Pengujian *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	55.523075	3	0.0000

Sumber: Output Eviews v.6, diolah

Di dalam pengolahan menggunakan software Eviews 6, diketahui nilai *p-value* = 0,0000. Dengan nilai *p-value* yang lebih kecil dari α (0,05), maka kesimpulan dari hasil *Likelihood Ratio Test* adalah menolak H₀, sehingga model yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

4.7 Analisis Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Estimasi fixed effect mendapatkan hasil pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan SILPA terhadap pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persamaan:

$$PDRB_{it} = 6748.106 + 11,26376 PAD_{it} + 8,578026 BM_{it} - 3.113039 SILPA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Sehingga bila dijabarkan dalam tabel terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	T. Statistik	Prob.
Konstanta	6748.106	1161.415	5.810246	0.0000
PAD	11.26376	4.839989	2.327229	0.0213
BM	8.578026	5.218917	1.643641	0.1024
SILPA	-3.113039	7.543059	-0.412702	0.6804
R ²	0.938500			
<i>Adjusted R²</i>	0.921990			
F-Statistik	56.84394			

4.7.1 Uji Persamaan Regresi Keseluruhan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan ukuran 5% atau 1%. Jika probabilitas yang ditunjukkan $> 5\%$, maka model ditolak, sedangkan jika $< 5\%$, maka model diterima.

Hasil pengujian dengan menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan nilai F-statistik sebesar 56.84394 dan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000. Dengan melihat perbandingan nilai probabilitas (F-statistik) yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan SILPA secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.

4.7.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dinotasikan dengan R^2 . Koefisien ini merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Namun, banyak penelitian menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 karena tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model.

Hasil pengujian dengan menggunakan *Fixed Effect Model* menghasilkan nilai *adjusted* R^2 sebesar 0.921990 (92,19%). Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan SiLPA berpengaruh sebesar

92,19% terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, sedangkan sisanya sebesar 7,81% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar penelitian.

4.7.3 Uji Parsial (Uji t)

Analisis statistik secara parsial digunakan untuk melihat signifikansi dari masing-masing variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat pada model dengan menggunakan uji t, dimana hipotesis nol ($H_0: \beta = 0$) artinya nilai koefisien sama dengan nol, sedangkan hipotesis alternatif ($H_1: \beta \neq 0$) artinya nilai koefisien berbeda dengan nol. Signifikansi ini secara langsung dapat dilihat dari besarnya angka probabilitas. Jika *p-value* (*t-stat*) lebih kecil dari α ($\alpha = 5\%$ atau 0,05) maka variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya atau tolak H_0 . Selain menguji signifikansi dengan *p-value* (*t-stat*) dengan α sebesar 5%, juga dilakukan uji arah atas nilai koefisiennya.

Hasil pengujian regresi atas model penelitian ini menunjukkan satu variabel bebas dinilai signifikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu PAD (prob = 0,0213) dan dua variabel bebas lainnya dinilai tidak berpengaruh signifikan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas di atas 0,05, yaitu BM (prob = 0, 0,1024), dan SILPA (prob = 0,6804). Secara keseluruhan dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 6.748,106. Hal ini berarti bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tetap atau tidak mengalami penambahan atau pengurangan (nilainya nol), maka PDRB sebesar nilai konstanta yaitu 6.748,106.

- Nilai koefisien PAD sebesar 11,26376. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan PAD satu persen, maka variabel PDRB akan naik sebesar 11,26% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- Nilai koefisien BM sebesar 8,578026. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan BM satu persen, maka variabel PDRB akan naik sebesar 8,57% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- Nilai koefisien SILPA sebesar -3.113039. Ini menunjukkan bahwa SILPA mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan variabel PDRB. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan SILPA satu persen, maka variabel PDRB akan turun sebesar 3.11%. Dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.8 Pembahasan Hasil Analisis

Sesuai dengan hasil dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) yang telah dipilih sebagai metode yang dipakai dalam penelitian dan sudah dijelaskan sebelumnya, maka pada pembahasan ini akan disajikan penjelasan hasil dari temuan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang signifikan dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh beberapa kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur, akan memberi pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hasil ini selaras dengan penelitian Simanjuntak (2007) tentang Analisis Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu. Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di Kabupaten Labuhan Batu. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari peranan pajak dan retribusi daerah, serta sumber daya manusia yang tersedia dengan kemampuan perencanaan dan penganggaran yang cukup baik.

b. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel bebas yang kedua dalam regresi ini yaitu Belanja Modal (BM). Dalam hasil regresi ini, variabel belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anasmen yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena belanja modal tidak berpengaruh cukup besar terhadap PDRB.

Penggunaan variabel belanja modal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan alasan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan untuk pembangunan meliputi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Dalam penelitian Andrie Novandy, Anhulaila M. Palampanga dan Ridwan (2015), belanja langsung daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah lebih didominasi oleh belanja modal yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pengeluaran atau belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri sehingga ikut membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik. Belanja modal digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran-pengeluaran ini bersifat investasi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dimulai dari pengalokasian alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti pembangunan infrastruktur, dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup perekonomian daerah. Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian belanja modal tersebut, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Jika sarana dan prasarana publik telah terpenuhi dan dianggap memadai untuk dipergunakan oleh masyarakat maka pelaksanaan aktivitas sehari-hari dapat berjalan secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pula pada tingkat produktivitas masyarakat yang semakin meningkat. Selain itu infrastruktur yang memadai juga akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Semakin banyak investor yang menanamkan investasi di suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan ikut meningkat.

c. Pengaruh SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel bebas yang ketiga dalam regresi ini yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dalam hasil regresi ini, variabel SiLPA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dituliskan sebelumnya bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah di kota/kabupaten se-Jawa Timur pada tahun 2009-2013. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin besarnya SiLPA maka akan memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikasi SiLPA yang negatif berasal dari sisa penggunaan anggaran yang tidak disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini berarti SiLPA yang terbentuk disebabkan oleh ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal, namun besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 4,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Jawa Timur semakin baik.

d. Implikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa turun naiknya pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan SiLPA suatu daerah. Semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan SiLPA maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pada dasarnya, PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Tambunan, 2006)..

Belanja langsung daerah kabupaten/kota di Jawa Timur lebih didominasi oleh belanja modal yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pengeluaran atau belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri sehingga ikut membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik. Belanja modal dan SiLPA yang digunakan oleh pemerintah dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran-pengeluaran ini bersifat investasi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung misalnya pada belanja modal dan Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan, memiliki keterkaitan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimulai dari pengalokasian alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti pembangunan infrastruktur, dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup perekonomian daerah. Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian belanja modal tersebut, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Jika sarana dan prasarana publik telah terpenuhi dan dianggap memadai untuk dipergunakan oleh masyarakat maka pelaksanaan aktivitas sehari-hari dapat berjalan secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pula pada tingkat produktivitas masyarakat yang semakin meningkat. Selain itu infrastruktur yang memadai juga akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Semakin banyak investor yang menanamkan investasi di suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan ikut meningkat.

Tingginya belanja modal menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Belanja modal ini diyakini mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Tingginya belanja modal disebabkan pemerintah daerah di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur masih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Kegiatan masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana publik yang memadai. Oleh karenanya pemerintah daerah berupaya menyediakan sarana dan prasarana publik yang memadai dan layak digunakan dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, irigasi, air bersih, gedung sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor-kantor dan lain sebagainya. Jika sarana dan prasarana publik tersebut telah terpenuhi dan layak digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari, kesejahteraan masyarakat pun akan tercipta dengan baik. Selain kesejahteraan masyarakat yang dapat tercipta dengan baik melalui sarana dan prasarana yang memadai, juga akan mendatangkan investor yang akan melakukan kerjasama melalui investasi sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, pentingnya pembangunan infrastruktur di suatu daerah dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang baik.

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan hasil tersebut, Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif

seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Namun pada kenyataannya, besarnya nilai belanja tidak sebanding dengan hasil akhir yang diperoleh. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefe,2003).